

**KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN  
ABDURRAHMAN WAHID**



Proposal

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.sos

Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

**Citra Ageng Saputri**

NPM : 1531040004

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**2020/1440 H**

## **ABSTRAK**

### **KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID**

Oleh Citra Ageng Saputri

*Khilafah* dalam sejarah, sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *Khilafah* Abu Bakar, *Khilafah* Umar Bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini kata *Khilafat* dapat mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam islam. Kata *Khilafah* analog pula dengan kata *Imamah* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan. Bermula dari inilah kiranya penulis tertarik untuk membahas konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan *Library Research*. Dimana data-data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data kepustakaan untuk menekankan terhadap aspek analisa dan kajian terhadap obyek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengungkapkan berbagai informasi mengenai kualitatif dengan pendeskripsian yang di teliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data-data pokok melalui data yang diperoleh langsung dari buku Taqiyuddin An-Nabhani dan buku Abdurrahman Wahid. Menggunakan metode kepustakaan dimana sumber data yang dipakai seperti data primernya, buku As Syahshiyah Al Islamiyah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Nizham al-Hukmi fi al-islam, menggerakan Tradisi, Esai-esai Pesantren, Islamku Islammu Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Islam Tanpa Kekerasan. Maupun data sekunder yang dijadikan acuan agar dapat memperoleh data mengenai konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, Berdasarkan pengertian Khalifah dalam beberapa ayat Al-Quran, seorang Khalifah adalah sebagai wakil atau pengganti Allah dalam mengatur, menata, dan memakmurkan kehidupan ummat manusia dan alam sekitarnya di bumi ini. Seorang Khalifah berkewajiban sebagai penguasa dan pengatur kehidupan ummat manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis, adil, damai, dan sejahtera. Meskipun di lain pihak ada yang beranggapan bahwa khilafah adalah kepemimpinan sebagai pengganti dan pelanjut kepemimpinan kenabian, Dengan arti khalifah adalah khalifatur rasul (pengganti dan pelanjut kepemimpinan nabi) bukan khalifatullah (pengganti atau wakil Allah).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

---

*Jl. Letkol H. Endro Sutarmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289*

---

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan  
Abdurrahman Wahid

Nama : Citra Ageng Saputri

NPM : 1531040004

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah di  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

**Pembimbing I**

**Drs. Effendi, M. Hum**  
**NIP. 195807211986031004**

**Pembimbing II**

**Nadirsyah Hawari, M.A**  
**NIP. 197406282008011013**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. Tin Amalia Fitri, M.si**  
**NIP. 197801302011012004**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Ageng Saputri

NPM : 1531040004

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid”** merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dilain waktu hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung, 23 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,



Citra Ageng Saputri  
NPM. 1531040004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( QS. An-Nisa:59)*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan cinta dan kasih, perhatian serta memberikan motivasi selama studiku:

1. Ayahanda M. Ishak dan Ibunda Tutik Sriani yang telah melindungi, mengasuh, mendidik, selalu menyayangi, mengarahkan, memotivasi dan senantiasa berdoa untukku, sabar demi kesuksesanku. Berkat doa dan restu kedua orang tua sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semua ini adalah salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua peneliti.
2. Adik-adikku tersayang Shinta Dwi Saputri, Zhakia Tri Ananda Putri dan si bungsu Aliya Cahyaning Putri yang telah menjadi penyemangat tak kenal lelah, selalu berdoa untuk kesuksesan peneliti.
3. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Yogi Muhammad Zamili yang telah menjadi penguat setelah orang tua.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam angkatan 2015(Nurhayati, Dea Myasari, Dani Andriyanto, Risa Ristiani, Andresti Sapitri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu)

yang selalu memberikan semangat, nasehat dan motivasi. Semoga Allah mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan kita.

7. Kepada teman-teman yang selalu mendampingi dalam menyelesaikan proses skripsi, (Lina Fauziah, Idnu Ali Said Abdillah, Jayus, Nur Mayasari, Nia Rosida dan lain sebagainya).
8. Kepada organisasi tercintaku beserta para sahabat, anggota dan kader yang berada di dalamnya, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ulu Timur (IKAM OKUT)
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Citra Ageng Saputri, dilahirkan di Desa Bangun Sari Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada tanggal 21 Desember 1997 dan Tinggal di desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Peneliti adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Terlahir dari pasangan bapak Muhammad Ishak dan Ibu Tutik Sriani. Riwayat pendidikan dimulai dari SDM 1 Tanjung mas dan selesai pada tahun 2009. Masuk di SMP N 1 Buay Madang Timur dan selesai pada tahun 2012. Lanjut bersekolah di MAN 1 Oku Timur dan selesai pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi, masuk ke dalam jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA, 2015/2016. Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada tahun 2020 peneliti menulis skripsi dengan judul “Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin Annabhani Dan Abdurrahman Wahid”. Semoga ilmu yang selama ini didapat saat berkuliah di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti sendiri dan umumnya untuk orang lain.

Bandar Lampung, 27 Maret

2020

Peneliti



**Citra Ageng Saputri**

**NPM. 1531040004**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, penguasa seluruh ciptaan-Nya dengan kasih sayang-Nya yang telah memberikan Hidayah, Taufik dan Rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Tokoh Politik Dunia, Pemimpin Umat, Suri Tauladan bagi seluruh umat, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran, pedoman bagi perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini.

Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat utama untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). atas bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr.H. Muhammad Mukri, M.Ag**, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. M. Afif Anshori, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak **Drs. Effendi, M. Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Nadirsah Hawari, M.A** , selaku pembimbing II, yang telah sabar, ikhlas dan susah payah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluargaku terutama bapak dan ibu yang telah memberikan semangat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepala staf perpustakaan Ushuluddin dan Studi Agama, perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, beserta staf karyawan atas diperkenalkannya penulis meminjam literature yang telah dibutuhkan.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2015 Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddn UIN Raden Intan lampung.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

Peneliti



**Citra Ageng Saputri**  
**NPM. 1531040004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN ` .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP. ....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	13
F. Tujuan Penelitian .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Tinjauan Pustaka .....	16

## BAB II KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN UMUM

A. Pengertian Khilafah menurut para Ahli .....	17
B. Prinsip-Pprinsip Khilafah.....	21
C. Kewajiban Khalifah (Imamah).....	23
D. Dalil-Dalil Yang di Gunakan dalam Kewajiban Membentuk Khilafah.....	24
E. Bentuk-Bentuk Pemerintahan .....	27

## BAB III BIOGRAAFI SYAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani	
1. Kelahiran Dan Pertumbuhan Taqiyuddin An-Nabhani .....	32
2. Ilmu Dan Pendidikan.....	34
3. Aktivitas Politik Taqiyuddin An-Nabhani.....	39
4. Karya-Karya Taqiyuddin An-Nabhani .....	46
B. Biografi Abdurrahman Wahid	

1. Kelahiran Dan Pertumbuhan Abdurrahman Wahid.....	50
2. Ilmu Dan Pendidikan Abdurrahman Wahid .....	52
3. Aktivitas Politik Abdurrahman Wahid .....	57
4. Karya-Karya Abdurrahman Wahid.....	61

#### **BAB IV KONSEP KHILAFAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN, PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANDANGAN SYAIKH TAAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID TERHADAP KONSEP KHILAFAH**

A. Konsep Khilafah Dalam Perspektif Alqur'an .....	63
B. Perbedaan Dan Persamaan Pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid .....	69
1. Konsep Khilafah Menurut Syaikh Taqiyuddin AN- Nabhani .....	69
2. Konsep Khilafah Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid .....	75
3. Perbedaan Konsep Khilafah Antara Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid .....	81
4. Persamaan Konsep Khilafah Antara Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

*Transliterasi* Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R	ع	‘ (Koma terbalik di atas)	ن	N
ت	T	ز	Z			و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	ه	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	ء	‘ (Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ح	<u>H</u>	ص	Sh	ق	Q		
خ	Kh	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

### 2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Vokal Rangkap	
ـَ	A	جَدَلْ	ا	Â	سَارَ	...يْ	Ai
ـِ	I	سَدِلْ	ي	Î	قَبِلْ	...وْ	Au
ـُ	U	ذَكَرْ	و	Û	يَجُورْ		

-----							
-------	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Ta Marbutah

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na'im.

### 4. Syaddah dan Kata Sandang

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan kata sandang "al", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul bertujuan untuk menjadi gambaran dalam pembuatan karya ilmiah. Judul yang di ajukan oleh penulis adalah **”Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid”**.

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara terperinci supaya mudah dipahami serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud proposal ini, pertama penulis akan menguraikan beberapa pokok-pokok yang terkandung didalam judul proposal ini. Judul juga dimaksudkan agar lebih memudahkan pemahaman, kemudian untuk mengarahkan kepada pengertian yang jelas sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Berikut ini penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi.

##### 1. Konsep khilafah:

Konsep berasal dari bahasa latin “Conceptum” yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipahami. Kemudian konsep juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak mengenai situasi, objek atau kejadian, suatu pemikiran, sebuah gagasan atau gambaran mental. Secara etimologis *khilafah* mengandung arti perwakilan, pergantian, atau “jabatan *khalifah*”. Istilah ini berasal dari kata arab, “*khalf*” yang berarti “wakil”, “pengganti”, dan “penguasa”. Dalam perspektif politik sunni *khilafah* didasarkan pada dua rukun, yaitu:

*consensus* elit politik (*ijma*) dan pemberian legitimasi (*bay'ah*).<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah, *khilafah* dikenal sebagai institusi politik Islam pengganti atau penerus fungsi Rasulullah sebagai pembuat *syara'* dalam urusan agama dan politik. Dapat dipahami jika yang penulis maksud mengenai konsep khilafah adalah segala sesuatu yang berhubungan mengenai tata kelola dari sistem khilafah ini.

## 2. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani beliau adalah seorang ulama kelahiran Ijazim, Palestina utara. Beliau adalah seorang ulama sekaligus pendiri sebuah partai Islam yang bernama Hizbut Tahrir dimana adanya pembentukan partai ini beliau dedikasikan untuk Islam.

## 3. Abdurrahman Wahid

Selain itu ada K.H Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Indonesia lebih tepatnya adalah cucu dari K.H Hasyim Asy'ari, kemudian beliau selain pernah menjabat sebagai presiden juga disebut sebagai bapak plural Indonesia.

Dalam judul skripsi ini, penulis mengangkat tentang "Konsep Khilafah dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan " yang akan meneliti mengenai sistem bernegara pemikiran dan pandangan dari kedua tokoh tersebut, dimana kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran dan pandangan yang unik mengenai sistem bernegara.

## B. Alasan Memilih Judul

---

<sup>1</sup> Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, Moh. Zainullah, *Diskursus bernegara dalam Islam dari perspektif historis, teologis, hingga keindonesiaan*, (Cet. 1), (Malang: UB Press, 2018), h. 4



## 1. Alasan Objektif

Alasan objektif karna konsep khilafah sejak kemunculannya hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di khalayak sebah mimpi yang dianggap tabu oleh sebagian kalangan dan sebuah mimpi yang menjadi pengharapan bagi khalayak lainnya. Diantara banyaknya pihak yang pro maupun kontra terhadap konsep khilafah ini ada 2 tokoh yang sama sama berpengaruh pada zamannya, juga terdapat pandangan yang berbeda dari kedua tokoh tersebut mengenai sistem bernegara. Dalam skripsi ini selain meneliti mengenai pandangan pemikiran keduanya yang berbeda, penulis juga akan meneliti persamaan dari kedua tersebut. Kedua tokoh ini adalah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Kajian tentang konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahad Wahid karena adanya korelasi yang berhubungan dengan program studi penulis yaitu prodi Pemikiran Politik Islam.
- b. Terdapat banyak sumber literasi dan tokoh yang membahas tentang khilafah yang bisa dijadikan sebagaisumber data dan literatur serta kemudian dapat dianalisis.

### **C. Latar belakang masalah**

Setelah wafatnya Rasulullah saw wafat adalah masalah khilafah, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Persoalan ini meskipun dapat diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khilafah, namun persoalan ini muncul kembali ketika terbunuhnya Usman bin Affan ra dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Usman ra.

Pada masa klasik, penafsiran mengenai sistem khilafah tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan pada masa Umayyah. Tetapi setelah penetrasi barat masuk ke dalam Negara Islam muncul, sehingga menjadi ajang kontroversi. Kontroversi ini menimbulkan berbagai aliran pemikiran yaitu : pertama, aliran tradisionalis yang mengatakan bahwa dasar dan sistem pemerintahan sudah diatur lengkap didalam Alqur'an. Kedua, aliran sekuler yang mengatakan bahwa islam hanyalah agama spiritual yang tidak bisa dikaitkan dengan pemerintahan khususnya masuk kedalam ranah politik. Ketiga,

Para pemikir muslim berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya ajaran islam yang membahas perihal Negara. Dalam hal ini ada dua pengertian yang berkaitan erat yaitu khilafah dan imammah, meskipun berasal dari sumber yang sama, yaitu Alquran, akan tetapi dalam praktik politik yang terjadi didalam duniaislam, istilah tersebut dipakai oleh dua kelompok dimana secara politik dianggap bersebrangan, yakni syiah dan sunni.

Istilah khilafah *fil ardi*, muncul sejak kekuasaan Bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Menurut Azyumardi Azra, penggunaan istilah tersebut memiliki signifikansi dengan upaya absolutisme kekuasaan. Sebab dengan demikian menunjukan kekuasaan yang sah atau bahkan kekuasaan yang mutlak dan suci. Kata khilafah dalam bentuk kata verbal merupakan berasal dari bahasa arab yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku aktif yang biasa disebut dengan khalifah. Dengan demikian kata khilafah menunjukkan kepada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh khalifah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak akan terwujud suatu khilafah tanpa kehadiran khalifah.<sup>2</sup>

Menurut Ganai, khilafah secara literature, yang berarti pergantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan khilafah secara teknis, adalah lembaga pemerintahan islam berdasarkan kepada din (agama) dan memajukan syariah.<sup>3</sup> Berdasarkan pandangan tersebut kemudian hadir lah sebuah konsep yang menyatakan bahwa islam meliputi din wa addaulah (agama dan negara).

Dewasa ini kita melihat suatu fenomena yang menarik untuk diperbincangkan yaitu mengenai khilafah dimana konsep khilafah islamiyah yang kembali muncul dipermukaan setelah hadirnya beberapa kelompok muslim menggaungkan secara nyaring betapa pentingnya penyelenggaraan Negara atas dasar syariah. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran dari sejumlah

---

<sup>2</sup>Ade shitu-Agbetola, "Theory Of Al-Khilafah in The Religion-Political View Of Sayyid Qutb". *Journal Of Studies and Research in Islam*, Vol.XXIV, No. 1, (2001), h. 59.

<sup>3</sup>Ghilam Nabi Ganai, "Muslim Thikers and Their Concept of Kilafah", dalam *Hamdard islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol.XIV, No. 2, Summer, 1991, hlm.25.

kelompok yang mengagap bahwa adanya sejumlah kegagalan yang dilakukan oleh para nasionalis sekuler dalam mengelola negara.

Di Indonesia sendiri slogan-slogan yang mengarah dan menuntut berdirinya pemerintahan atas dasar khilafah adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Diantara slogan yang sering kali mereka kumandangkan yakni berbunyi *sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah*. Tuntutanya adalah agar bentuk Negara menggunakan model khilafah sementara penelenggaraan Negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat islam.

Konsep khilafah yang disuarakan oleh golongan Hizbut Tahrir ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang *qadli* (hakim), penyair, sastrawandan merupakan salah seorang dari ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyyah. Bernama Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ismail bin usuf An Nabhani dinisbahkan pada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Hifa, Palestina Utara. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di daerah izjim pada tahun 1909. Beliau banyak menarik pelajaran dari diskusi-diskusi dan majelis-majelis fiqih yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syaikh Yusuf An-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan beliau yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh kakeknya yang begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Mustafa mengenai



perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syariah.

Sejak remaja Taqiyuddin sudah mulai melakukan aktivitas politiknya yang dipengaruhi oleh kakeknya. Syaikh Yusuf An-Nabhani yang pernah terlibat dalam diskusi-diskusi bersama orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (moderenisme), tokoh-tokoh *Freemasonry*, dan pihak-pihak lain yang dianggap membangkang dengan Daulah Utsmaniyyah.

Aktivitas dan perdebatan-perdebatan politik, menjadi salah satu ruang gerak Taqiyuddin bersama para mahasiswa di Al Azhar dan di kuliah Darul Ulum yang telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.

Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya untuk menggaungkan seruaan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar pada saat itu. Disamping itu Taqiyuddin juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius agar membangkitkan umat islam. Dan karena tekadnya yang sudah sangat bulat itu beliau aktif dalam berbagai kegiatan politik meskipun dalam perjalannya tidak jarang pemikiran-pemikiran beliau ditentang oleh kalangan ulama. Beliau rutin mengadakan diskusi-diskusi sehingga akhirnya beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan islam.

Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah untuk partai tersebut. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Maka dari itu aktivitas beliau pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.

Taqiuddin beranggapan bahwa Negara Islam adalah sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya *thariqah* yang dijadikan oleh Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus tetap ada dan bukan hanya temporal keberadaannya.

Berikut adalah sekilas pandangan Syaikh Taqiuddin An-Nabhani mengenai konsep khilafah. Menurut Taqiuddin An-nabhani *khilafah* adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada ditangan seorang kepala Negara/kepala pemerintahan dengan gelar *khalifah*, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewenangan untuk mengatur urusan umat, baik keagamaan maupun ke duniawian, yang hukumnya wajib

bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.<sup>4</sup>

Kemudian dikatakan bahwa *khilafah* adalah bentuk dari kepemimpinan bagi seluruh umat muslim diseluruh dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariat islam dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh islam serta hukum-hukum yang telah disyariatkannya, kemudian untuk mengemban dakwah islam diseluruh dunia, dengan cara memperkenalkan islam kepada mereka dan mengajak mereka kepada islam, serta berjihad di jalan Allah SWT. Wujud dari khilafah adalah negara Islam yang hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar'i akidah Islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, Rasulullah saw. membangun sebuah kekuasaan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam.

Kemudian dalam konsep Negara Islam yang ditawarkan oleh taqiyuddin An-nabhani bahwa negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satu konsep pun mengenai kehidupan atau hukum selain yang lahir dari akidah Islam. Akidah Islam pun tidak akan mentolelir konsep dan pemahaman apapun yang tidak lahir dari islam. Negara Islam tidak akan mentolelir konsep demokrasi untuk kemudian diadopsi dalam tubuh negara Islam. Karena demokrasi bukan konsep yang lahir dari akidah Islam. Disamping karena pemahaman-pemahaman yang lahir dari konsep Demokrasi tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Konsep Nasionalisme yang lahir dari demokrasi misalnya,

---

<sup>4</sup>Mohamad topan, "Kekuasaan menurut Taqiyuddin Annabhani dalam tinjauan etika politik". *Jurnal filsafat*, Vol. 23 No. 2 (2013), h. 154.

dengan berlabel apapun konsep tersebut tetap tidak diperbolehkan, karena konsep tersebut tidak lahir dari akidah Islam. Disamping konsep-konsep yang lahir dari akidah Islam telah mengancam dan mencegah serta menjelaskan bahaya-bahayanya. Konsep Patriotisme (*wathaniyah*), bagaimanapun bentuknya, tetap tidak diperbolehkan. Karena konsep tersebut lahir bukan dari akidah Islam. Disamping karena Patriotisme bertentangan dengan konsep-konsep yang lahir dari akidah Islam.

Selain ada pendapat yang ingin menegakan khilafah ternyata ada juga pendapat yang menolak berdirinya konsep khilafah, menganggap bahwa konsep khilafah tidak bisa ditegakkan dalam sebuah Negara yang demokrasi dan plural, di Indonesia sendiri ada seorang tokoh yang menentang tegaknya konsep khilafah yaitu K.H Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gusdur.

Sejak zaman penjajahan hingga setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia selalu menekankan pada persatuan dan kesatuan. Itulah sebabnya pokok dari pikiran pertama yang terkandung dalam UUD 1945 adalah “persatuan dan kesatuan”. UUD 1945 pun sarat dengan faktor-faktor integrasi atau pemersatu, yang kemudian terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh MPR dalam ketetapan-ketetapannya. Usaha untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan nasional harus dilakukan secara terus menerus.

Indonesia merupakan bangsa yang religius yang sarat akan keberagamannya. Keberagamannya itu meliputi ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya dan

ideologi. Jika dijabarkan lebih rinci, terutama dalam masalah keberagaman, bangsa Indonesia pada dasarnya mempunyai watak , varian dan loyalitas keberagaman yang plural yang diakui oleh Pancasila dan UUD 1945. Itulah sebabnya pada saat HTI masuk ke Indonesia dengan menawarkan konsep khilafah dimana Negara harus tegak atas dasar syariat Islam ditolak oleh bapak pluralisme Indonesia Abdurrahad Wahid. Penolakan Abdurrahad Wahid terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi itu didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (syariat) tidak memiliki konsep yang jelas mengenai Negara.

Abdurrahad Wahid mengklaim, sepanjang hidupnya ia telah mencari dengan sia-sia makhluk yang bernama Negara Islam itu.. “sampai hari ini belum juga saya temukan. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana Negara dibuat dan dipertahankan”.<sup>5</sup>

Dasar yang dipakai oleh Gusdur ada dua. Pertama, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui bai’at oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok umat yang ada pada saat itu.

Sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum muslimin hedaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan posisinya. Ini berarti system yang dipakai adalah penunjukan. Sementara

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islammu Islam kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 18.

Umar menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk 2 dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu dipilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar. Selanjutnya Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam sejarah islam.

Kedua, besarnya Negara yang diidealisasikan oleh islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, Negara islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks Negara-bangsa (*nation-state*) ataukah hanya Negara kota (*city-state*).

Ketiga, menurut Abdurrahad Wahid islam tidak mengenal doktrin mengenai Negara. Dalam soal bentuk Negara, menurutnya tidak memiliki aturan baku. Hal ini bergantung Negara bersangkutan apakah mau menggunakan model pemerintahan demokrasi, theokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi gusdur adalah terpeenuhinya tiga kriteria yaitu: *pertama*, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. *Kedua*, ditegakkan keadilan. *Ketiga*, adanya jaminan kebebasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas skripsi ini akan membahas permasalahan politik islam dengan fokus pada pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dikemas dengan judul **“Konsep Khilafah dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahad Wahid”**

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep khilafah dalam perspektif Alqur'an ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahad Wahid terhadap konsep khilafah ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui konsep khilafah dalam perspektif Alqur'an.
- b. Untuk dapat memahami persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Gusdur mengenai konsep khilafah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini ditulis agar memperluas pengetahuan mengenai pemikiran politik islam. Dalam hal ini berhubungan dengan konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahad Wahid.

###### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulis ingin agar penelitian ini bisa menjadi tambahan sumber literasi dan referensi untuk mahasiswa dan fakultas, terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin prodi pemikiran



politik islam terkait dengan konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahad Wahid.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Ditinjau melalui judul penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana data-data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data kepustakaan untuk menekankan terhadap aspek analisa dan kajian terhadap obyek yang diteliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengungkapkan berbagai informasi mengenai kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh atau langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama bersangkutan memerlukannya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data-data pokok melalui data yang diperoleh langsung dari buku Taqiyuddin An-Nabhani dan buku Abdurrahad Wahid.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>6</sup>M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.81

Data sekunder ialah data yang sudah jadi, atau yang dipublikasikan untuk khalayak umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder juga disebut dengan data yang tersedia.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan dimana sumber data yang didapat baik itu data primer maupun data sekunder yang dijadikan acuan agar dapat memperoleh data mengenai konsep khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahad Wahid.

#### **H. Tinjauan Pustaka**

Agar dapat terhindar dari pengulangan penelitian yang membahas mengenai masalah yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau dalam bentuk tulisan lain, untuk itu beberapa pemaparan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya :

Skripsi berjudul **“Perbandingan Sistem Khilafah antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi”** oleh Mulhendri mahasiswa Uin Sunan Kalijaga fakultas Adab. Dalam skripsi ini dijelaskan perbandingan secara rinci pemikiran dua tokoh muslim yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi mengenai system khilafah.

Tesis dengan judul **“konsep khilafah dalam Alqur’an (studi komparatif terhadap tafsir Ibn katsir dan tafsir Al-Misbah)”** oleh Diyan Yusri mahasiswa program pasca sarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Dalam tesis

ini membahas tentang keprihatinan penyusun dalam melihat kondisi masalah kepemimpinan baik di dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya.

Skripsi dengan judul ***“Konsep Negara menurut Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani”*** oleh Ansori , dimana skripsi ini memaparkan dengan begitu komprehensif mengenai system khilafah.

Jurnal TAPIS dengan judul ***“Khilafah Islamiyah dan profil kepemimpinan pada lembaga keagamaan di Indonesia”*** Oleh A.Zaeny dosen fakultas ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Dalam jurnal ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan sosial dimana terjadi interaksi timbal balik (antara yang memimpin dan mereka yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama).

## **BAB II**

### **KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN UMUM**

#### **A. Pengertian Khilafah Menurut Para Ahli**

Menurut KH. M. Shiddiq Al-Jawi, Khilafah adalah jalan yang gampang dalam mengatasi masyarakat agar tercipta masyarakat yang serba tertib, dalam kehidupan sosial, politik, maupun agama, bebas dari berbagai kelemahan dan kekurangan.<sup>7</sup>

Menurut Ulil Hardawi, Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.<sup>8</sup>

Menurut Syekh Abdul Majid Al-Khalidi, Khilafah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan didunia untuk menegakkan hukum-hukum syara serta mengemban dakwah Islam keseluruh dunia.

---

<sup>7</sup>Rokhmat S. Labib, *Jalan Menuju Khilafah*, (Jakarta, Al- Wa'ie, 2012), h. 9.

<sup>8</sup> Khilafah Dalam Pandangan NU, (On-Line), Tersedia di: <https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu>

Menurut Syekh Abdul Qodir Hasan Baraja, Khilafah adalah wadah bagi kehidupan bersama seluruh kaum muslimin dimuka bumi untuk melaksanakan ajaran Islam dengan seorang Imam/Kholifah/Amirul mukminin sebagai pemimpin.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Sa'ad al-Hushain mengenai Khilafah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menunjuk pemimpin sebagai pengganti (Khilafah) beliau setelah beliau (tidak dengan musyawarah dan tidak dengan lainnya) dengan nash yang jelas, tetapi penunjukkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Abu Bakar Radhiyallahu anhu untuk mengimami shalat kaum muslimin saat sakit beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, ini sebagai isyarat yang jelas terhadap kelayakan Abu Bakar dan keutamaannya dalam mengatur kekuasaan setelah beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.<sup>10</sup>

Menurut M. Kusman Sadiq, Khilafah merupakan jalan dengan menggunakan alasan rasional dan merupakan metode Syar'i, dalam mewujudkan daulah islamiah yang digali dari hukum syariah dengan mengikuti kegiatan aktifitas(sunnah) Rasulullah SAW.<sup>11</sup>

*Khilafah* dalam sejarah, sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *Khilafah* Abu Bakar, *Khilafah* Umar Bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini kata *Khilafat* dapat mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam islam. Kata

---

<sup>9</sup> Pengertian Khilafah Menurut Cendekiawan Islam, (On-Line), Tersedia di: [https:// www .sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-islam](https://www.sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-islam).

<sup>10</sup> Syaikh Sa'ad al-Hushain, *Khilafah Di Bumi, Media Ahlussunah Wal Jamaah*, (On-line), Tersedia di: <https://almanhaj.or.id/13982-khilafah-di-bumi-2.html>

<sup>11</sup> Rokhmat S. Labib, *Jalan Menuju Khilafah*,...h. 17

*Khilafah* analog pula dengan kata *Imamah* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.<sup>12</sup>

Istilah *khilafah* dan *khalifah* (dalam pengertian pemimpin/kepala negara) mulai terdengar dan dipergunakan pertama kali oleh Abu Bakar ketika dipilih menjadi pemimpin umat Islam di saqifah bani Saidah, yang kemudian diteruskan oleh tiga generasi pemimpin selanjutnya, yakni Umar, Utsman dan Ali. Melihat kecenderungan orientasi politik Abu Bakar dan generasi sesudahnya, *khalifah* yang dimaksud adalah dalam pengertian kekuasaan politik penerus Nabi. Khalifah dalam pengertian sebagai pengganti Nabi sebagai pemimpin politik untuk meneruskan cita-cita perjuangan Islam, bukan sebagai pengganti posisi kenabian.<sup>13</sup>

Pengertian *Khilafah* secara etimologi maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah tersebut muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi dalam urusan agama dan politik. Istilah *Khilafah* memiliki beberapa pengertian yaitu, perwakilan, pergantian, atau jabatan *khalifah*. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab “*khalf*” yang berarti wakil, pengganti dan penguasa, ada juga yang mengemukakan bahwa kata (kh-l-f) dalam berbagai bentuknya mengandung

---

<sup>12</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: penerbit Pustaka, 1987). H. 55

<sup>13</sup> Ma'shum, “Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2 (Desember, 2013), 483

makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji yang kemudian melahirkan kata *Khilafah* dan *Khalifah*.<sup>14</sup>

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, imamah merupakan pengganti tugas kenabian dalam melindungi agama dan mengatur urusan dunia.<sup>15</sup> Sementara itu, Al-Baidhawi dan Al-Ijji memberikan unsur tambahan dalam mendefinisikan *khilafah*, yaitu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti dan tunduk pada orang yang dipilih dan diangkat sebagai pengganti dalam menjalankan tugas kenabian tersebut. Al-Baidhawi menyebutkan definisi imamah sebagai proses seorang umat Islam dalam menggantikan tugas Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, dimana ada kewajiban bagi seluruh umat islam untuk mengikuti atau tunduk kepadanya.<sup>16</sup>

*Khalifah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum *syariah*. Hal itu karena islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum *syariah*.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Warison Munawwir, kamus *Al-manawwi, Arab Indonesia*, Cet. IV ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 361-363

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, cet. 1 (Kuwait: Maktabah Ibnu Qutaibah, 1989), h.3

<sup>16</sup> Ali Sadikin dkk, "Takdir Daulah Khilafah: Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru," *Syamina*, Edisi XIII, Agustus 2014, 54.

<sup>17</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, (Pemerintah dan Administrasi) Terj. Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h.31



Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur terpenting dari institusi khilafah adalah, (1) wakil dalam menjalankan tugas kenabian, (2) pertanggung jawaban untuk menegakkan agama dan mengatur kemaslahatan umat, dan (3) cakupan kepemimpinannya meliputi urusan agama dan dunia umat Islam serta adanya kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk tunduk dan taat kepadanya.

Adapun mengenai gelar yang dipakai dalam sistem ketatanegaraan *khilafah*, terkenal tiga istilah yang sering disematkan kepada para pemimpin yang telah dilantik, yaitu *khalifah*, *amirul mukminin* dan imam.

## B. Prinsip-Prinsip Khilafah

Definisi Khilafah menurut Taqiyuddin An Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) adalah sebagai berikut:

الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لأقامة احكام الشرع الاسلام , و حمل الدعوة  
الإسلامة الى العالم

*“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.”*

Dari definisi Khilafah di atas, dapat dipahami tiga poin penting:

*Pertama*, bahwa Khilafah itu adalah suatu *kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia*. Jadi Khilafah bukan kepemimpinan khusus (*ri`asah khashash*), seperti kepemimpinan seorang wali (gubernur) di suatu wilayah (propinsi), atau seperti kepemimpinan khusus pada bidang tertentu, misalnya kepemimpinan seorang Qadhi Qudhat dalam bidang peradilan Islam (*Al Qadha`*).

Dapat dipahami juga Khilafah adalah institusi politik pemersatu umat Islam, sebab kepemimpinan Khilafah bersifat umum bagi umat Islam seluruh dunia, tanpa melihat lagi batas-batas negara-bangsa (*nation state*) yang ada sekarang ini.<sup>18</sup>

*Kedua*, bahwa fungsi pertama Khilafah adalah menerapkan Syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, baik itu politik (pemerintahan), ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Penerapan syariah ini adalah politik dalam negeri dari negara Khilafah.<sup>19</sup> *Ketiga*, bahwa fungsi kedua Khilafah adalah mengemban (menyebarkan) dakwah Islam ke seluruh dunia Metode untuk mengemban dakwah ini adalah dengan menjalankan *jihad fi sabilillah* ke negara-negara lain. Mengemban dakwah dengan jalan *jihad fi sabilillah* inilah yang menjadi dasar politik luar negeri dari negara Khilafah.<sup>20</sup>

Maka dari itu, dipahami bahwa keberadaan Khilafah, akan dapat terwujud paling tidak 3 (tiga) hal; *pertama*, persatuan umat dalam satu negara, yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS. Ali-Imran:103). *Kedua*, penerapan syariah Islam secara menyeluruh (*kaaffah*), yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS Al Baqarah: 208, QS Ali Imran: 85). *Ketiga*, penyebarluasan Islam sebagai rahmat bagi

---

<sup>18</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *As Syakhshiyah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Ummah), 2003, Juz 2 hlm. 14

<sup>19</sup> Lihat *Al Mausuw'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah*, Bab Definisi *Imarah*, Juz 6 hlm.149

<sup>20</sup> Hizbut Tahrir, *Afkar Siyasiyah*, 1994, hlm. 7-9.

seluruh manusia dan seluruh alam, yang menjadi karakter agama Islam (lihat misalnya QS Al Anbiya': 107).

### C. Kewajiban Khilafah (*Imamah*)

Disebutkan dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah* Juz 6:164.

جمعت الأمة على وجوب عقد الامت وعمل ان الام يجب عليها الانقياد لا امام عادل يقيم فيهم

احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعة التي التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم<sup>21</sup>

اجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه

“Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.”<sup>22</sup>

Bahkan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizbut Tahrir) menyebutkan, “mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini sebagaimana kewajiban manapun yang difardhukan Allah atas kaum muslimin adalah perkara yang pasti, tak ada pilihan di dalamnya dan tak ada

<sup>22</sup> Lihat *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah*, Bab *Al Imamah Al Kubro*, Juz 6 hlm.

toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besar maksiat, yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya.”

#### **D. Dalil-Dalil yang digunakan dalam Kewajiban Membentuk Khilafah**

Dalil-dalil kewajiban Khilafah ada 4 (empat), yaitu: Al Qur`an, As Sunnah, Ijma` Shahabat, dan Qaidah Syar`iyyah.

Dalil Al Qur`an, antara lain firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-NYA, dan Ulil Amri di antara kamu.” (QS An-Nisaa` : 59)

Ayat ini dipahami, ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulil Amri di antara mereka, yaitu para Imam (Khalifah). Perintah untuk mentaati Ulil Amri ini adalah dalil wajibnya mengangkat Ulil Amri, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati Ulil Amri ini berarti perintah mengangkat Ulil Amri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) bagi umat Islam adalah wajib hukumnya.<sup>23</sup> Dalil Al Qur`an lainnya, adalah firman Allah SWT :

---

<sup>23</sup> Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al ‘Uzhma ‘Inda AhlisSunnah wal Jama’ah*, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49

Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan hukum di antara kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah (Syariah Islam). Sesuai Kaidah ushul fiqih menetapkan bahwa perintah kepada Rasulullah SAW hakikatnya adalah perintah kepada kaum muslimin, selama tidak dalil yang mengkhususkan perintah itu kepada Rasulullah SAW saja. Dalam hal ini tak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya kepada Rasulullah SAW, maka berarti perintah tersebut berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya hingga Hari Kiamat nanti. Perintah untuk menegakkan Syariah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang Imam (Khalifah). Maka ayat di atas, dan juga seluruh ayat yang memerintahkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, hakikatnya adalah dalil wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), yang akan menegakkan Syariah Islam itu.

Selain itu, ayat-ayat yang memerintahkan qishash (QS AlBaqarah : 178), hudud (misal had bagi pelaku zina dalam QS An Nuur: 2; atau *had* bagi pencuri dalam QS Al Maidah: 38), dan ayat-ayat lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada adanya seorang Imam (Khalifah). Ayat-ayat semisal ini, berarti adalah dalil untuk wajibnya mengangkat

seorang Imam (Khalifah), sebab pelaksanaan ayat-ayat tersebut bergantung pada keberadaan Imam itu.<sup>17</sup>

Selain itu, kewajiban mendirikan khilafah, juga menggunakan Dalil As Sunnah, antara lain sabda Nabi SAW:

**من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية**

*“Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah.”* (HR Muslim, No 1851).

*Dalalah* (penunjukkan makna) dari hadis di atas jelas, bahwa jika seorang muslim mati jahiliyyah karena tidak punya baiat, berarti baiat itu wajib hukumnya. Sedang baiat itu tak ada kecuali baiat kepada seorang imam (khalifah). Maka hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) itu wajib hukumnya.

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa, mendirikan khilafah adalah suatu kewajiban paling agung bagi seluruh umat Islam. Memang pada mulanya kewajiban ini hanya fardu kifayah, namun karena seluruh umat Islam di dunia belum ada yang berhasil menegakkan khilafah, maka kewajibannya menjadi fardu ‘ain. Tidak berhenti sampai di situ, pelaksanaan fardu ‘ain ini tidak sekedar ada fard, tapi sudah berubah menjadi *qadaul fard*, dengan alasan batas waktu boleh kosongnya khilafah hanya tiga hari. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa, mendirikan khilafah adalah suatu kewajiban paling

agung bagi seluruh umat Islam. Memang pada mulanya kewajiban ini hanya fardu kifayah, namun karena seluruh umat Islam di dunia belum ada yang berhasil menegakkan khilafah, maka kewajibannya menjadi fardu,,ain Tidak berhenti sampai di situ, pelaksanaan fardu ain ini tidak sekedar adaul fard, tapi sudah berubah menjadi *qadaul fard*, dengan alasan batas waktu boleh kosongnya khilafah hanya tiga hari.

#### **E. Bentuk-Bentuk Pemerintahan**

Ada bermacam-macam sistem pemerintahan, baik dilihat dari praktek penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para ahli. Utrecht berpendapat bahwa bentuk atau sistem pemerintahan dapat terbagi pada dua bagian; *pertama*, pemerintahan dalam negara kesatuan yang didesentralisasi. *Kedua*, sistem pemerintahan gabungan negara-negara yang terdiri: protektorat, koloni, konfederasi, federasi, commonwealth of nations dan uni (uni riil dan uni personil).<sup>24</sup>

Aristoteles membagi kepada enam macam bentuk, yaitu; monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik konstitusional dan demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja, namun pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara tirani adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Dengan begitu, negara monarki adalah lawan negara tirani. Aristokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa

---

<sup>24</sup> E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966), hlm. 317.



orang berhiar mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah negara oligarchi yakni negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri *Policy* adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah demokrasi.<sup>25</sup>

Bila kita membicarakan apakah bentuk negara maka umumnya yang dimaksudkan adalah apakah suatu negara itu monarki, republik, kekaisaran atau federal.

### **1. Monarki**

Kata monarki berasal terdiri dari “*monos*” yang berarti satu- satunya, dan “*archie*” asal dari “*archein*” yang berarti berkuasa, maka monarki berarti kekuasaan ditangan seorang manusia.<sup>35</sup> Bentuk Negara monarki adalah bentuk Negara tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih dari 900 kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 pada abad ke-20. Sedangkan pada decade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada. Namun hanya empat Negara yang mempunyai penguasa monarki dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Monarki berjalan secara turun-temurun, seorang anak raja yang kemudian menjadi raja, mewarisi keadaan kemewahan dari ayahnya

---

<sup>25</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999), hlm. 187

tanpa mengalami sendiri susah payahnya.<sup>26</sup> Jadi apabila seorang calon raja tidak terlalu mengenal pengaturan politik pemerintahan Negara, maka jalanya roda pemerintahan diserahkan pada perdana menteri yang mengepalai kabinet. Namun pada masa sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi, hampir kebanyakan adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.<sup>27</sup>

## **2. Republik.**

Republik adalah sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideology dari banyak partai politik yang menamakan partai mereka partai republik. Beberapa dari antaranya mempunyai akar dari anti-monarkisme. Bentuk republik berdiri berdasarkan asas kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara. Kepala negara republik tidak diangkat berdasarkan keturunannya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 77

maupun kepribadiannya melainkan kemauan rakyat secara politis dan kenegaraan.<sup>28</sup>

### **3. Kekaisaran**

Kekaisaran disebut juga imperium adalah suatu kelompok politik yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh seorang kaisar. Imperium juga diartikan sebuah kekuasaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luas. Pada masa kekaisaran romawi, maka daerah kekuasaanya yang sangat luas di sekitar laut tengah sering disebut sebagai daerah inperium Romanum. Namun dalam perkembangan selanjutnya imperium memiliki pengertian yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya.

Bentuk kekaisaran menganggap tidak sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dalam perekonomian wilayah-wilayah colonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur lah yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat.

### **4. Federal**

Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi disamping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang- wewenang yang

---

<sup>28</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 59

dapat diurus sendiri. Jadi disini tidaklah semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya, atau pemerintah federal tetapi masih ada urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Biasanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara- negara bagian kepada pemerintah federal, adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama dari negara-negara bagian tersebut misalnya urusan keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan pertahanan dan sebagainya semacam itu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*, hlm. 65.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Moqsith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al Quran, Epilog K.H. Abdurahman Wahid*, (Depok: Kata Kita, 2009)
- Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al „Uzhma „Inda AhlisSunnah walJama“ah*, (Kairo : t.p), 1987
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Ahfa Waid, *Nasihat-Nasihat Keseharian Gus Dur, Gus Mus, Dan Cak Nun*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017)
- Ahmad Warison Munawwir, kamus *Al-manawwi, Arab Indonesia*, Cet. IV ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 361-363
- Ali Abdurraziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm. Terj. Muhammad. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* (Bandung: Pustaka. 1985)
- Ali Sadikin dkk, “Takdir Daulah Khilafah: Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru,” *Syamina*, Edisi XIII, Agustus 2014.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, cet. 1 (Kuwait: Maktabah Ibnu Qutaibah, 1989)
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996)
- E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Universitas Padjajaran)
- Faisal Ismail. *NU Gusdurisme dan Politik Kiyai*
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: Noktah, 2019)
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- M. Ali Dodiman, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Penyeru Khilafah Dari Tanah Al-Quds*, (Bandung: Mafahim Pers, 2019), Bagian Awal ( Pengantar).
- M. Ali Dodiman, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Penyeru Khilafah dari Tanah Al-Quds*, Cet.I, (Bandung: Mafahim Press 2019)
- Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: penerbit Pustaka, 1987)
- Moh. Toriquddin, *Relasi Agama Dan Negara* (Malang: UIN-Malang Press, 2009)

- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)
- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, terj. Moch Nur Ikhwan, Cet-1 (Yogyakarta: Islamika, 2003)
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Taqiuddin An Nabhani, *As Syakhshiyah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Ummah), 2003, Juz 2
- Taqiuddin An-Nabhani, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, terj (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
- Abdurrahman Nusantara, *Umat Menggugat Gusdur “Menelusuri Jejak Penentangan Syariat”*, Aliansi Pecinta Syariat. Bekasi. 2006
- Abdurrahman Nusantara. *Umat Menggugat Gusdur” Menelusuri Jejak Penentangan Syariat”*. Abdurrahman wahid, *Islamku Islammu Islam kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: Democracy Project,2011)
- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta :LKISYogyakarta,2001)
- Ahmad Bahar. *Biografi Kiyai Politik Abdurrahman Wahid* . Jakarta Bina Utama Prakarsatama Publishing. 1999
- Ar-Rais, M. Dhiya’ ad-Din, *Islam Dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, ‘Ali ‘Abdur Raziq, Bandung: Pustaka Pelajar, 1985
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Greg, Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: Noktah, 2019).
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002).
- Hizb At-Tahrir, *Mengenal Hizb At-Tahrir: Partai Politik Islam Hizbut Tahrir, Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*, (Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta Selatan, 2004).
- Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, hlm.1667. Jimly, Asshidique, *islam dan kedaulatan rakyat*, (Jakarta: gema isnsani press, 1995)
- Listiyono Santoso. *Teologipolitik Gusdur*. AR -RUZZ. Yogyakarta. 2004
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002)

Musa Masykur Ali, *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur*, Erlangga Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966)

Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Ridwan, Saidi, *Kepemimpinan Islam Indonesia Kinidan Esok*, Antar Kota, Jakarta, 1986.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1998).

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islammu Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: Democracy Project, 2011).

### **Sumber Lainnya**

A mubarak dan Fathurrahman Karyadi , “Biografi Singkat” A.M.Y . Spe (editor) , *Gusdur di Mata Keluarga dan Sahabat*, h. 10

Ade shitu-Agbetola, “Theory Of Al-Khilafah in The Religion-Political View Of Sayyid Qutb”. *Journal Of Studies and Research in Islam*, Vol.XXIV, No. 1, (2001), h. 59.

Ali Yahya, *Gusdur di Mata Adik-Adiknya*, Jombang, Pustaka Tebui reng 2010, h. 21

Andi Haris, Khilafah dalam al-Quran, (On-line) tersedia di: <https://www.bungandi.com/2020/01/khilafah-dalam-al-quran.html?m=1>

An-Nabhani, Taqiyuddin, 2001, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW, Membangun Daulah Islamiyyah Hingga Masa Keruntuhan*, Penerjemah Umar Faruq, Penerbit Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

Badiul Hadi, *Berhentilah Bicara Khilafah*, (on-line), tersedia di: <https://alif.id/read/badiul-hadi/khilafah-b219806p/>

Epranaprianto, *Peran Abdurrahman Wahid dalam politik indoensia (1999-2001*, UIN Raden Fatah Palembang: 2015, h.48.

Ghilam Nabi Ganai, “Muslim Thikers and Their Concept of Kilafah”, dalam *Hamdard islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol.XIV, No. 2, Summer, 1991, hlm.25.

Hizbut Tahrir , *Struktur Negara Khiafah*, (Pemerintah dan Administrasi) Terj. Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006)

Hizbut Tahrir Indonesia, *Refleksi: 79 Tahun Tanpa Daulah Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: HTI Press, 2003)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-taqiyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir-Ideologis> (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm.29.

Ihsan Samarah, *Ma'fhumal-Adalah al-Ijtima'iyah fial-Fikrial-Islamial Mua'shir*, terj Muhammad Shiddiqal-Jawi, *Syeikh Taqiyuddin Nabhani, Meneropong perjalanan spiritual dan dakwahnya*, alAzharPress, Bogor, 2003, cetII. H. 13

Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*

Ma'shum, "Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2 (Desember, 2013), 483

Makna Khilafah Dalam Al-Quran Dan Sunah, (On-Line), tersedia di: <https://persis.or.id/makna-khilafah-dalam-al-quran-dan-sunnah> M. Abror Rosyidin, *Gus Dur Dan Konsep Negara Islam*, (On-line), tersedia di: [https://tebui reng. online/gus-dur-dan-konsep-negara-islam/](https://tebui reng.online/gus-dur-dan-konsep-negara-islam/)

Mohamad topan, "Kekuasaan menurut Taqiyuddin Annabhani dalam tinjauan etika politik". *Jurnal filsafat*, Vol. 23 No. 2 (2013), h. 154. Pandangandan kritikan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap filsafat bisa dilihat dalam kitab-kitabnya, khususnya kitab *Assyaksiyah Islamiyah*.